



PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Digital Repository Universitas Jember

Prosiding

VIRTUAL SEMINAR DAN KONFERENSI NASIONAL

Manajemen Strategis pada
Sektor Publik :
Capacity Building Dalam Meningkatkan
Kesiapsiagaan Aparatur
Menghadapi *Governance Crisis*
Akibat Pandemi COVID - 19

TEMA KONFERENSI :
**KEBIJAKAN, PERENCANAAN,
MANAJEMEN PUBLIK**

Prosiding

Virtual Seminar dan Konferensi Nasional

“Manajemen Strategis pada Sektor Publik: Capacity Building dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Aparatur Menghadapi Governance Crisis Akibat Pandemi COVID-19”

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Malang, 12 November 2020



Penerbit

Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

Prosiding

Virtual Seminar dan Konferensi Nasional

**Manajemen Strategis pada Sektor Publik:
Capacity Building dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Aparatur
Menghadapi Governance Crisis akibat Pandemi COVID-19.**

Organizing Committee:

Ketua	: Firda Hidayati, DPA
Wakil Ketua	: I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Ph.D.
Sekretaris	: Alimudin, M.AB.
Bendahara 1	: Agung Suprianto, M.AP.
Bendahara 2	: Romadlon Miftakhurizqi
Koordinator Kesekretariatan	: Bayu Amengku Praja, M.Si.
	: Ike Arni Noventi, M.AP.
	: Anang Fitrianto, S.Sos.
	: Diaz Mufida, SE.
	: Marganing Sulistyoyo Rahayu
	: Alfian Efendi
Koordinator Acara	: Rendra Eko Wismanu, M.AP.
	: Muhammad Rizky Pratama, MPA.
Koordinator Teknis	: Bayu Indra Pratama, MA.
	: Hendrik Tri Laksono
Koordinator Publikasi	: Muhammad Rosyihan Hendrawan, M.Hum.
	: Abd. Qadir Muslim, M.Pd.

Steering Committee:

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
Yusri Abdillah, Ph.D.
Dr. Hamidah nayati Utami, M.Si.
Dr. Mochamad Rozikin, M.AP.

Reviewer :

Firda Hidayati, DPA.

I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Ph.D.

Sujarwoto, Ph.D.

Asti Amelia, Ph.D.

Wike, DPA

Dr. Alfi Haris, MMG

Dr. Ike Wanasmawatie, M.AP

Dr. Farida Nurani, M.Si.

Dr. Mohammad Nuh

Dr. Moh. Said, M.AP

Dr. Hemawan, M.Si

Oscar Radyan Danar, Ph.D.

Editor :

Firda Hidayati, DPA.

I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Ph.D.

Muhammad Rosyihan Hendrawan, M.Hum.

Abd. Qadir Muslim, M.Pd.

Setting/Layout :

Denny Iswanto, S.AP

Penerbit :

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Jl. MT Haryono 163 Kota Malang, Prov. Jawa Timur 65145

Telp. (0341) 553737, Faks. (0341) 558226. Website: <https://fia.ub.ac.id>

©2021 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang terus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dengan ijin-Nya Virtual Seminar dan konferensi Nasional “Manajemen Strategis pada Sektor Publik: *Capacity Building* dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Aparatur Menghadapi *Governance Crisis* Akibat Pandemi COVID-19”, yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya pada Selasa, 12 November 2020 berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik serta mendapat antusiasme yang tinggi dari para peserta sehingga Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema tersebut dipilih dengan alasan untuk mensosialisasikan dan mendapat masukan dari kalangan akademisi, aparatur pemerintah dan masyarakat umum akan strategi dari institusi pemerintah dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Selain itu masyarakat umum, akademisi dan aparatur pemerintah dapat memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengakselerasi pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam menghadapi krisis dan pengembangan strategi yang lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi krisis yang berkepanjangan.

Para akademisi nasional dan pemerintah telah banyak menghasilkan penelitian serta rencana strategis yang berkaitan dengan penguatan dan perkembangan institusi, komunikasi, dan politik untuk menghadapi krisis yang berkepanjangan, namun masih banyak yang belum didiseminasikan dan dipublikasikan secara luas. Hasil dari penelitian serta rencana strategis ini perlu untuk dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat dapat membantu memonitor dan memberikan tenaga serta waktu untuk mempercepat pelaksanaan strategi tersebut. Atas dasar tersebut, Seminar Nasional ini menjadi salah satu ajang bagi para aparatur serta Akademisi nasional untuk mempresentasikan strategi dan penelitiannya, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam hasil penelitian, serta mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan.

Seminar dan konferensi ini diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai bidang ilmu dari seluruh Indonesia, yang telah membahas berbagai bidang seperti ekonomi, administrasi, komunikasi, dan politik dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk memperkuat Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi dan politik global yang disebabkan oleh COVID-19. Kami sangat berharap seminar dan prosiding ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua khalayak. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya, Pemakalah, Peserta, Panitia, dan Sponsor yang telah berupaya mensukseskan Seminar Nasional ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua usaha baik kita.

Malang, 31 Desember 2020.

Ketua Panitia Pelaksana
Firda Hidayati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PAD, EQUALITY FUND DAN BELANJA MODAL: PERTUMBUHAN EKONOMI MEMODERASI RETRIBUSI DAERAH Dirvi Surya Abbas	1
<i>MABELO</i> : SOLUSI PERSAMPAHAN DI KECAMATAN MANGGALA Suci Aprilya	15
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR Munari Kustanto dan Fitriyatus Sholihah	28
ANALISIS KESEHATAN POHON DENGAN MENGGUNAKAN METODE FOREST HEALTH MONITORING (STUDI KASUS PADA TIGA FUNGSI HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG) Rahmat Safe'i, Hari Kaskoyo, dan Arief Darmawan	42
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA ASN SELAMA COVID-19 PADA KANTOR IMIGRASI DI KOTA MEDAN Rezaky Ana Ashal	54
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: PERAN JARINGAN DALAM ADOPSI KEBIJAKAN PUBLIK Julijanti.....	68
PEKA.COM: STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM SEPEDA KEREN GUNA MENGHADAPI CRISIS GOVERNANCE AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TRENGGALEK Eni Febrianti, Yeni Puspitasari, Hafids Haryonno, dan Deby Febriyan Eprilianto	89
KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19: KAJIAN KONSTRUKSI PENILAIAN Dian Herdiana	102
MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI PENYALURAN BANTUAN BENIH PADI DI KABUPATEN PURWAKARTA Kurnia Prawira Saputra, Endang Wirjatmi Tri Lestari, Nita Nurliawati, dan Saekul Anwar	119
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK MELALUI <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)</i> DI KABUPATEN PURWAKARTA Kunto Adjie Wibowo.....	141
AKUNTABILITAS PELAKSANAAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI NTT Agung Jati Perkasa	154

STRATEGI KETAHANAN KEUANGAN DAERAH DALAM GOVERNANCE CRISIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 Binti Azizatul Nafi'aha	164
ANALISIS KOMITMEN DAN STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 PADA INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Matheus Gratiano Mali	173
PENGUJIAN KEMBALI VOLATILITAS KEBIJAKAN TRILEMMATERHADAP VARIABEL MAKROEKONOMI DI INDONESIA Moch. Syamsudin	196
STRATEGI DYNAMICS FOR INDONESIA PUBLIC SECTOR MANAGEMENT IN THE CRISIS Tati.....	207
KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19: KAJIAN KONSTRUKSI PENILAIAN Dian Herdiana	213
PERAN PEMERINTAH DALAM EKSISTENSI PENGUSAHA TAPE DI KABUPATEN BONDOWOSO Abul Haris Suryo Negoro dan Alfareza Firdaus	230
PERAN INKUBATOR PEMERINTAH DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN BAGI UMKM Setiowiji Handoyoa, Uus Faizala, dan Siti Kholiyaha	253
PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DESA Denny Iswanto	266
COMMUNITY INSTITUTION EMPOWERMENT INNOVATION PROGRAM Thomas Bustomi, Merdi Hajiji, Didi Turmudzi,	280

**PERAN PEMERINTAH DALAM EKSISTENSI PENGUSAHA TAPE
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

***THE GOVERNMENT'S ROLE ON TAPE ENTREPRENEURS EXISTENCE
IN BONDOWOSO REGENCY***

¹Abul Haris Suryo Negoro, ²Alfareza Firdaus

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

¹haris@unej.ac.id, ²alfarezafirdaus20@gmail.com

Abstract

Bondowoso Regency is known as the center of typical tape food in East Java. Tape as a snack and food commodity from cassava has survived until now. Various problems arise experienced by tape entrepreneurs in facing competition with today's food products. The current reality, Tape as a typical Bondowoso food has not been noticed by policy makers so that the empowerment of tape entrepreneurs is not comprehensive and sustainable. Tape entrepreneurs need their existence regarding production capability, marketing, product innovation and competitiveness. This is done because some tape entrepreneurs have small capital so that they are unable to diversify products that are more innovative and competitive. Management of tape as a typical food can support branding, product promotion and tourism in Bondowoso district. The synergy between the Bondowoso government and the tape entrepreneurs will improve the economic welfare at large. This study used qualitative methods with locations in Bondowoso Regency, East Java Province. The focus of this research is to determine the role of government and entrepreneurs in the development of tape products in Bondowoso. The government and businessmen can support each other in the development of tape products as superior products. Empowerment that creates a creative economy with various processed tape products such as dodol, fried tape, brownie tape, burnt tape which can last a long time. Tape product as an opportunity to improve the welfare and special food of Bondowoso

Keywords: *Role of Government, Empowerment, Entrepreneur Tape*

Abstrak

Kabupaten Bondowoso dikenal sebagai daerah sentra makanan khas tape di Jawa Timur. Tape sebagai komoditas jajanan dan makanan dapat bertahan sampai sekarang. Berbagai permasalahan muncul yang dialami para pengusaha tape menghadapi persaingan dengan produk makanan masa kini. Realitas kekinian, Tape sebagai makanan khas Bondowoso belum diperhatikan oleh pengambil kebijakan sehingga pemberdayaan pengusaha tape belum komprehensif dan berkesinambungan. Pengusaha Tape membutuhkan eksistensi berkaitan kemampuan produksi, pemasaran, inovasi produk dan kemampuan bersaing. Hal ini dilakukan karena sebagian pengusaha tape memiliki modal kecil sehingga tidak mampu membuat diversifikasi produk yang lebih inovatif dan berdaya saing. Pengelolaan tape dapat mendukung promosi produk dan pariwisata Kabupaten Bondowoso. Sinergi Pemerintah Bondowoso dan pengusaha tape akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, fokus penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan produk tape. Pemerintah dan pengusaha dapat saling mendukung dalam pengembangan produk tape sebagai produk unggulan. Pemberdayaan yang menciptakan ekonomi kreatif dengan aneka produk olahan tape seperti dodol, tape goreng, brownies tape, tape bakar yang dapat bertahan lama. Produk tape sebagai peluang meningkatkan kesejahteraan dan makanan khas Bondowoso

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Pengusaha Tape

PENDAHULUAN

Kabupaten Bondowoso memiliki letak geogografis yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Kabupaten Bondowoso dengan penduduk sekitar 797.592 jiwa pada tahun 2019. Sektor pertanian sebagai andalan Kabupaten Bondowoso adalah sektor pertanian maka dari sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 205.263 orang atau sekitar 25,7% dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020). Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (2020) bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki potensi hasil pertanian berupa Singkong yang menjadi makanan kuliner khas daerah. Hasil pertanian seperti Singkong diolah menjadi tape sebagai produk makanan khas bondowoso Peruntukan jenis tanaman tersebut ada dua hal, untuk bahan pangan dan olahan bahan baku industri. Jenis Singkongnya ialah Adira 4 (Kaspro) digunakan untuk pembuatan tepung. Sedangkan untuk pembuatan tape, jenis Singkongnya tampak lebih kuning dan lebih padat karena menyerap air sedikit atau biasa disebut Singkong mentega (Sundari, 2010).

Singkong dengan mengalami peningkatan produktivitas sebesar 10,23% pada tahun 2019. Diperkuat data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso (2019) bahwa luas areal tanam Singkong tahun 2018 terluas berada di daerah Kecamatan Klabang dengan luas areal sebesar 489 Ha. Kecamatan Klabang menjadi lahan produktif untuk ditanami Singkong karena memiliki kontur tanah yang keras dan subur. Selain itu, Singkong di kabupaten Bondowoso juga ditanam di tanah pekarangan dan halaman rumah karena perawatannya yang mudah. Merujuk data penelitian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, diketahui bahwa tingkat persebaran tanaman Singkong semakin menurun dan berkurang. Permasalahan muncul berkaitan dengan persepsi petani yang beralih dari Singkong ke tanaman sengon dikarenakan harga Singkong yang dijual murah dan jumlah melimpah dipasaran. Selain itu, Singkong sebagai bahan makanan khas tape menjadi produk yang tidak laku dipasaran. Inovasi dan diversifikasi produk olahan Singkong belum banyak dilakukan sehingga memperburuk produksi di Kabupaten Bondowoso. Persebaran Singkong di Kabupaten Bondowoso dapat ditunjukkan dengan data luas, produksi dan produktivitas Singkong pada tahun 2018 dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Singkong Menurut Kecamatan di Kabupaten Bondowoso

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Maesan	14	307	21,93
2.	Grujugan	41	928	22,63
3.	Tamanan	55	1.259	22,89
4.	Jambesari Darus Sholah	70	1.591	22,73
5.	P u j e r	17	396	23,29
6.	Tlogosari	8	176	22,00
7.	Sukosari	23	530	23,04
8.	Sumber wringin	1	22	22,00
9.	Binakal	35	795	22,71
10.	Wringin	406	9.201	22,66
11.	Tegalampel	8	176	22,00
12.	Taman Krocok	223	5.079	22,78

13.	Klabang	489	11.237	22,98
14.	Prajejan	39	886	22,72
15.	Cerme	291	6.652	22,86
	Total	1.720	39.234	22,81

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso (2018)

Adanya produksi Singkong berasal dari wilayah di Kabupaten Bondowoso yang semakin menurun membuat eksistensi pengusaha tape menjadi terancam akibat dari peralihan fungsi lahan di masyarakat. Adanya pandemi Covid-19 yang membatasi orang untuk bepergian keluar kota, membuat pasar dari Tape Bondowoso berkurang dan membuat daya jual tidak meningkat. Padahal potensi perkembangan industri olahan makanan dan minuman tahun 2019 cenderung tinggi di Kabupaten Bondowoso. Merujuk pada data Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2020 terdapat 3.338 perusahaan, 11.126 tenaga kerja, dan nilai produksi mencapai Rp342.196.716.500. Khusus untuk pengusaha tape, tercatat ada 113 pengusaha tape dan menyerap 209 tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2020).

Singkong sebagai produk pertanian yang populer memiliki potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bondowoso. Berkembangnya inovasi dan teknologi informasi memberikan kesempatan agar produk olahan Singkong menjadi tape populer kembali di Bondowoso dan sekitarnya. Produk tape sebagai makanan khas Bondowoso dapat dikembangkan menjadi makanan kuliner bernilai jual tinggi apabila ada inovasi produk. Inovasi produk yang dapat dikembangkan dengan membuat olahan tape menjadi roti, dodol, jenang, brownies dan lainnya. Masyarakat juga menganggap bahwa tape sebagai makanan khas Bondowoso sehingga dahulu Bondowoso dikenal sebagai kota Tape.

Bondowoso sempat dikenal khalayak sebagai produsen makanan khas Tape. Tape sebagai makanan khas memiliki potensi, peluang dan tantangan. Problematika yang muncul dalam tata kelola Tape tidak hanya di tingkat pengusaha tape tetapi juga pada petani Singkong, pemerintah daerah, pangsa pasar dan inovasi produk. Alur problematika dikaitkan dengan eksistensi tape dengan hubungan pengusaha tape dengan petani berkaitan jumlah pasokan Singkong. Peran pengusaha tape yang belum di dukung oleh asosiasi pengusaha tape, selain itu peran pemerintah daerah dalam peningkatan pemberdayaan pengusaha tape. Kebijakan di kabupaten Bondowoso belum mendukung dengan kebijakan publik yang mengelola pariwisata berbasis kuliner berbasis potensi produk khas daerah. Membangun hubungan yang efektif dan sinergi antara pihak yang berkepentingan seperti, petani Singkong, pemerintah daerah, pengusaha tape, masyarakat, dan asosiasi terkait. Peran pemerintah menjadi utama untuk mengerakkan potensi tape sebagai makanan khas Bondowoso melalui kebijakan dan pelayanan publiknya. Pendelegasian kewenangan pemerintah daerah secara jelas dalam tata kelola tape melalui melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso menjadi titik sentral pemberdayaan pengusaha tape. Mengingat Kabupaten Bondowoso ialah penghasil tape yang mempunyai ciri khas tersendiri dari tape asal dari kota lain dan sudah cukup dikenal oleh masyarakat sebagai “Kota Tape”. Upaya tersebut dapat berupa program pemberdayaan secara langsung oleh pemerintah dan pihak terkait agar Bondowoso Kota Tape dapat terus eksis dan dapat memperluas pangsa pasar.

LANDASAN TEORI

1. Teori peran

Peran merupakan gabungan antara beberapa teori dan konsep disiplin ilmu yang ada di ranah teori sosial. Menurut Soerjono Soekanto (1990) tiap orang memiliki kemampuan untuk memiliki peran dalam eksistensi di ruang publik. Peran seseorang tidak lepas dari hak dan kewajibannya sebagai manusia untuk berkembang dan adaptasi di masa depan. Peranan tersebut dijalankan sesuai dengan norma dan ketentuan yang telah disepakati karena hal tersebut berhubungan dengan kewajiban seseorang tersebut dalam menjalankan peranannya sebagai seseorang yang telah menyanggah suatu status sosial atau kedudukan.

Bruce (2013) menjelaskan fungsi peranan adalah tindakan yang dapat diamati dan yang menjadi ciri orang yang diamati, peran sebagai seseorang dimana konsep peran tersebut dibatasi oleh perilaku seseorang satu dengan yang lainnya, peran sebagai suatu konteks yang dibatasi dalam beberapa cara oleh spesifikasi kontekstual dan tidak mewakili kumpulan total dari semua perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang melainkan telah menjadi sebuah kesepakatan secara langsung terkait norma dan aturan penerapan peranannya, dan peran sebagai suatu karakteristik dari sekumpulan orang dan konteks yang mana masing – masing perilaku mungkin merupakan bagian dari karakteristik orang lain tetapi mereka belum tentu termasuk dalam peran. Merujuk dari pendapat ahli di atas, dapat diketahui bahwa sebuah lembaga memiliki peran jika mengetahui permasalahan yang muncul dalam lingkungannya. Penyelesaian suatu masalah dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan mengelola wilayahnya dapat dilakukan dengan mengetahui peran para pihak yang terkait. Tiap pihak memiliki peran dan kewenangan yang berbeda yang dapat mempermudah menyelesaikan konflik dan koordinasi. Tiap organisasi memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda, tergantung bagaimana konteks dari organisasi tersebut dalam hal menyepakati aturan dan norma yang menjadi dasar peranan organisasi tersebut. Menurut Miner (2011) bahwa intuisi dan ide menjadi salah satu strategi secara rasional untuk mengetahui permasalahan yang muncul pada pengelolaan organisasi. Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan institusi dan ide yang lebih inovatif untuk melakukan pemetaan masalah dan mencari solusi terbaik bagi pengusaha tape di masa depan.

Ditegaskan kembali oleh Bruce (2013) bahwa jalannya organisasi publik tergantung dalam proses pengelolaan peranan konflik, dimana dihadapkan pada tuntutan harapan dan tujuan kedudukan tertentu yang nyatanya saling bertentangan dengan lainnya; adanya peranan nyata dari organisasi tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya; menerapkan peranan yang dianjurkan oleh masyarakat berkaitan proses *input* hak dan kewajiban; meminimalisir ketegangan peranan sehingga dalam proses akomodasi harapan/tujuan tidak mengalami hambatan; mengetahui ruang lingkup peranan agar tercipta hubungan antar individu/organisasi pada saat menjalankan peranannya. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan suatu harapan atau tujuan peranan yang maksimal. Maka haruslah dapat mengatur bagian – bagian tersebut sehingga peran individu/organisasi dapat berjalan sesuai dengan semestinya (*on the track*).

2. Pemerintahan Daerah

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah ialah

penyelenggara pemerintah daerah dan dewan perwakilannya dengan asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Merujuk pada undang-undang No 23 tahun 2014 bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dengan kewenangan berupa kebijakan dan pelayanan publik untuk menyelesaikan permasalahan sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah itu sendiri. Peran pemerintah menjadi penting berkaitan pengembangan potensi daerah baik sumber daya manusia maupun alam. Diperkuat pendapat Haris (2005) bahwa dalam orientasinya saat ini, peran pemerintah daerah tidak hanya menunggu arahan dari pemerintah pusat. Adanya sistem otonomi daerah, peranan pemerintah daerah seharusnya memiliki andil besar untuk menjadi fasilitator dan pengarah dalam mewujudkan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Juga, peran aktif dari *stakeholders* saat ini dibutuhkan untuk bersama – sama memberikan kontribusi terhadap permasalahan sosial yang timbul di tengah masyarakat. Adanya hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi bersama dalam rangka tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dipertegas oleh Azhari dan Negoro (2019) bahwa Indonesia menerapkan sistem *local self Government* yang terlaksana dilevel kabupaten dan kota. Wilayah tersebut memperoleh otonomi untuk mengelola kebijakan dan anggaran yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu *local self government* yang wilayahnya mempunyai banyak potensi untuk dikembangkan. Pembuatan kebijakan yang berdasarkan pengoptimalan potensi daerah dapat mengarahkan fokus pembangunan ke sektor – sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat. Fokus pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso haruslah berorientasi pada hal seperti peningkatan eksistensi pengusaha tape dengan kebijakan, pemberdayaan, dan pelatihan agar pengenalan promosi produk daerah Bondowoso Kota Tape kembali tergaungkan.

3. Tape Singkong Manis Bondowoso

Tape menurut KBBI (2016) ialah makanan tradisional yang dibuat dari singkong/Singkong kemudian direbus dan didinginkan dengan ragi. Setelah itu dibiarkan semalam atau lebih (fermentasi) hingga tape menimbulkan rasa manis. Proses fermentasi pada tape dapat meningkatkan cita rasa, aroma, dan gizi pada tape singkong tersebut. Biasanya proses fermentasi dilangsungkan dalam kurun waktu 2 – 3 hari. Disebutkan oleh Harmanyanti (2019) tape singkong memiliki kriteria rasa manis dan sedikit rasa aroma asam. Itu tergolong kualitas tape yang baik. Varian yang dimiliki oleh tape singkong asal Bondowoso memiliki cita rasa lebih manis, lebih keset (sedikit air), dan lebih tahan lama, bisa bertahan 1 – 2 hari. Ditegaskan oleh Natadjaja (2017) bahwa berbeda jenis tape asal Bondowoso dengan dari daerah lain yang memiliki rasa, aroma serta tekstur lebih lembek. Hal tersebut dipengaruhi oleh bahan baku Singkong/singkong yang didapat oleh para pengusaha tape. Singkong yang ditanam di daerah Bondowoso ialah jenis singkong mentega yang mempunyai karakteristik tumbuh di daerah sedikit air dan berwarna kuning.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode tersebut berguna sebagai panduan untuk melakukan penelitian serta digunakan sebagai

instrumen pengolahan data yang berdasarkan fakta – fakta di lapangan seperti apa dan bagaimana sehingga dapat dianalisis sesuai dengan topik pembahasan (Miles & Huberman, 2014). Peneliti melakukan serangkaian kegiatan penelitian di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, peneliti melakukan wawancara secara mendalam bersama dengan beberapa narasumber. Narasumber tersebut antara lain Kepala Bidang Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Bondowoso, pelaku usaha industri olahan Tape 92 dan pemilik usaha industri olahan Tape Wringin. Metode selanjutnya adalah observasi di dua desa yaitu Desa Jati Tamban dan Desa Wringin dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut ialah wilayah utama penghasil tape manis. Terakhir, dengan studi pustaka, peneliti menggunakan buku, jurnal ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan peran pengambil kebijakan dalam menjaga eksistensi pengusaha tape. Teknik analisis data dilakukan dengan mencari pola dan kesamaan hubungan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pengusaha Tape

Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu produsen Singkong di Jawa Timur menjadikan wilayah tersebut menjadi daerah pengolah Singkong hasil fermentasi menjadi produk olahan yaitu tape. Jenis Singkong yang cocok diolah menjadi tape ialah Singkong mentega yang mempunyai daging berwarna kuning biasanya dapat tumbuh di daerah yang tidak terlalu subur. Maka dari itu banyak Singkong di daerah Bondowoso yang ditanam di daerah tegal (Wachisbu, 2008). Tape Bondowoso memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis tape dari kota lain. Menurut Natadjaja dan Yuwono (2017) Tape Bondowoso ini memiliki rasa yang manis dan tekstur tape yang padat serta tahan lama. Tape Bondowoso memiliki rasa manis dari kandungan glukosa yang lebih baik dari tape asal kota lainnya, seperti dari Jember dan Situbondo. Meskipun dipasarkan di daerah Situbondo atau Jember dan daerah lainnya, tetapi tetap dikenal sebagai produk khas Bondowoso.

Merujuk dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bondowoso dengan produksi tapenya memiliki ciri khas tertentu sehingga dikenal oleh masyarakat sebagai “Kota Tape”. Usaha industri tape sudah mulai sejak lama ada di daerah Kabupaten Bondowoso. Pada awalnya tape banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah, tetapi pada saat ini Tape Bondowoso menjadi produk khas daerah Bondowoso. Persebaran pengusaha tape hampir ada di seluruh kecamatan di Bondowoso. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso tahun 2019 dari total 23 kecamatan, pengusaha tape tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan total 113 pengusaha tape industri pengolahan tape. Kecamatan Wringin ialah wilayah produsen tape terbanyak di Kabupaten Bondowoso yaitu sejumlah 30 pelaku usaha tape. Kemudian, Kecamatan Binakal dan Jambesari Darus Sholah terbanyak kedua dengan jumlah 15 pengusaha tape.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pengusaha tape 92, biasanya target pasar Tape Bondowoso hingga keluar kota, antara lain hingga Provinsi Bali, Surabaya, dan Probolinggo. Pemasaran keluar kota tersebut menggunakan agen yang biasanya menghimpun sejumlah produk tape, tetapi jika industri olahan tapenya sudah cukup besar maka pelaku usahanya memasarkan sendiri produknya hingga keluar kota. Harga Tape Bondowoso tersebut dipatok Rp 10.000 tanpa besek, dan Rp 12.000 menggunakan besek. Harga tersebut cukup stabil dan sudah berlangsung beberapa bulan. Walaupun pandemi Covid-19 ini yang membuat penjualan menurun, tetapi para pengusaha tape tidak mengubah harga jualnya. Jenis varian dari produk olahan tape ini beragam, tidak hanya berupa tape manis saja tetapi saat ini telah berkembang menjadi suwar suwir tape, *brownis* tape, tape bakar, dan lain – lain. Inovasi tersebut dalam rangka untuk memenuhi keinginan pasar yang mulai jenuh dengan tape manis, sehingga jika ada banyak jenis varian dari tape dapat menambah nilai jual produk olahan tape itu sendiri.

2. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pengusaha tape

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bondowoso 2018 – 2023 tertuang dalam Perda No. 1 Tahun 2019. Pada misi pertama disebutkan bahwa fokus pemerintah kabupaten salah satunya meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata daerah. Tape sebagai salah satu potensi berupa produk khas daerah dapat dijadikan sebagai salah satu produk yang dapat diintegrasikan dengan pengenalan wisata kuliner lokal sekaligus memberikan dukungan pangsa pasar yang jelas.

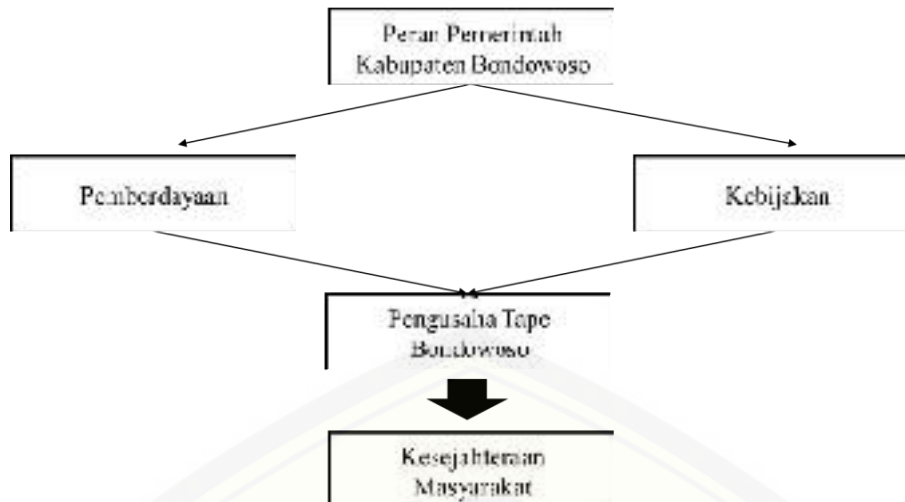
Adanya misi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso tersebut, seharusnya menjadi patokan optimalisasi pemberdayaan pengusaha tape. Pengusaha tape harus mendapatkan jaminan dan perlindungan baik secara hukum maupun kelembagaan. Pembentukan wadah asosiasi pengusaha tape menjadi penting sebagai peranan pemerintah daerah dalam upaya memfasilitasi kegiatan pengusaha tape. Kemudahan dalam perizinan berusaha untuk mendapatkan legal formal pendirian usaha harus diutamakan, karena sebagian besar pengusaha tape terdiri dari usaha kecil dan sebagian kecil yang termasuk usaha menengah dan besar. Adanya pengakuan secara formil dan kelembagaan oleh pemerintah daerah menandakan perbaikan sektor hulu tape mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pemasaran.

Pemerintah daerah harus berfokus pada dua aspek, yaitu merumuskan kebijakan khusus dalam rangka menjaga eksistensi pengusaha tape dan melaksanakan program pemberdayaan sosial ekonomi bagi pengusaha tape. Pemerintah kabupaten Bondowoso dapat berinisiasi dengan membuat pola kemitraan antara petani Singkong, pengusaha tape, asosiasi pengusaha tape, dinas terkait. kemitraan kolaboratif dapat dilakukan dalam mewadahi pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tape di Bondowoso. Sinergitas berkelanjutan akan mendorong kemampuan bersaing tape sebagai makanan khas Bondowoso. Kolaborasi yang terbentuk meningkatkan harga tape dengan segala inovasi dan diversifikasi produknya. Terciptanya produk unggulan akan mampu bersaing dengan kemampuan produktivitas, jaminan kualitas produk, pangsa pasar, dan jaringan pemasaran (Negoro, 2019). Pemerintah daerah melakukan fungsi pendampingan dan pengawasan berkaitan inovasi produk, strategi pemasaran yang berkesinambungan, pemberdayaan berkelanjutan. Selain itu, sinkronisasi antar bagian dalam tampak apabila pemerintah daerah membuat kebijakan yang fokus pada produk yang dibuat (Murdyastuti, 2019).

Perlunya koordinasi dalam pengembangan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah agar tercipta kebijakan dan layanan dalam berwirausaha (Bozhikin dkk, 2019). Diperkuat pendapat De Meio Reggiani (2019) bahwa Kebijakan pemerintah yang sesuai kebutuhan masyarakat akan efektif apabila mampu mendatangkan investasi dan kenyamanan dalam berwirausaha. Solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada pengusaha tape dilakukan dengan berbagai kemudahan akses dan pemberian bantuan. Peran pemerintah dapat dilakukan dengan pemberian insentif berupa pembebasan pajak dan subsidi kepada wirausaha sehingga dapat bertahan dari persaingan usaha (Heydari, 2017).

Peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso dibuktikan dengan adanya koordinasi antar dinas/instansi yang mempunyai fokus tujuan yang sama yaitu signifikansi pemberdayaan pengusaha tape. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso dapat memberikan sarana program pelatihan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan manajemen kewirausahaan bagi para pengusaha tape yang notabene memiliki pengetahuan yang rendah, mulai dari strategi manajemen keuangan, manajemen risiko, promosi produk, dan bisnis orientasi profit. Selain itu, pembentukan wadah Asosiasi Pengusaha Tape Bondowoso memiliki tujuan sebagai sarana advokasi dan berhimpun untuk menciptakan modal sosial pengusaha tape agar dapat menyalurkan aspirasinya serta sarana pengembangan para pengusaha tape. Selanjutnya, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bondowoso dalam peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi untuk memberikan bantuan sejumlah alat produksi modern yang dapat menambah kapasitas produksi tape manis, seperti alat fermentasi modern, mesin pemotong kulit singkong, saringan pembuatan tape, dan alat teknologi tepat guna lainnya. Selain itu, pentingnya dunia Perbankan dalam memberikan modal kredit rendah bagi para pengusaha tape untuk pembiayaan produksi. Kemudahan dalam perizinan oleh peranan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso sehingga dapat menciptakan suatu sistem dalam memudahkan pengusaha tape untuk mendirikan usaha dan kemudahan mendapatkan pengakuan berusaha secara formil.

Proses mendapatkan bahan baku yang berkualitas dibutuhkan peranan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dalam sosialisasi dan pemberdayaan petani singkong. Juga dengan pengembangan bibit Singkong varietas unggul khusus untuk produksi tape. Terakhir, dalam hal kepastian program pemberdayaan pengusaha tape antar dinas/instansi tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan/tujuan. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Produk makanan khas Tape Bondowoso yang memberikan perlindungan pada pengusaha tape dan para petani singkong. Peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pengembangan Tape menjadi sebuah produk unggulan membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan pemberdayaan berkelanjutan terutama pada pengusaha tape. Hal ini diperjelas dengan gambar 1 tentang peran pemerintah kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan tape:



Gambar 1. Bagan model peran pemerintah daerah dalam tata kelola tape di Kabupaten Bondowoso

Adanya peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendukung eksistensi pengusaha tape di atas diharapkan dapat terjadi kesinambungan dalam penciptaan program pemberdayaan pengusaha tape di Kabupaten Bondowoso. Pencanaan kembali promosi daerah yaitu “Bondowoso Kota Tape” agar produk unggulan daerah kembali mengunggulkan tape bondowoso. Tentunya semangat mempromosikan produk daerah tersebut tak hanya dilakukan di hilir tetapi secara bersamaan dihilir hingga hilir. Agar tercipta ekosistem pelaksanaan ekonomi kreatif yang dapat memunculkan lapangan pekerjaan baru, menciptakan daya kreasi produk turunan tape baru, dan memberikan efek domino yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah memiliki peranan penting untuk mendukung eksistensi pengusaha tape. Hal tersebut sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berfokus pada pembangunan sektor potensi daerah melalui pariwisata. Maka, pertama perlindungan akan kegiatan berwirausaha pengusaha tape melalui dukungan pemerintah berupa perumusan kebijakan dan program pemberdayaan untuk pengusaha tape. Kedua, peran dari dinas/instansi terkait untuk saling berkoordinasi tanpa mengedepankan ego sektoral untuk pemberdayaan pengusaha tape sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Ketiga, peran pemerintah daerah dalam mengembangkan promosi produk daerah dan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif pengusaha tape secara berkelanjutan, seperti upaya diversifikasi produk tape.

SARAN

Dari lingkup permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa saran/rekomendasi, berupa:

1. Mencanangkan kembali promosi daerah “Bondowoso Kota Tape” agar memiliki fokus pembangunan dan capaian target pembangunan tercapai.

2. Merumuskan suatu kebijakan yang memuat jaminan akan perlindungan dan pemberdayaan pengusaha tape di Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD Kabupaten Bondowoso,
3. Turut memfasilitasi pembentukan Asosiasi Himpunan Pengusaha Tape Bondowoso yang saat ini masih belum ada. Adanya asosiasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi pengusaha tape dan sarana untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha tape bondowoso,
4. Meningkatkan peran dan sinergitas antar dinas/instansi daerah dalam memberdayakan petani singkong/Singkong dan pengusaha tape secara berkelanjutan khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso,
5. Mengadakan kerja sama dengan *stakeholders*, seperti swasta, lembaga non profit, dan *marketplace* dalam rangka pengembangan usaha tape di Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. K., & Negoro, A. H. S. (2019). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Bondowoso dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso
- BPS Kabupaten Bondowoso. (2018). *Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, 2018*, online <https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2020/06/15/325/luas-panen-produksi -dan-produktivitas-ubi-kayu-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bondowoso-2018.html> diakses pada 19 November 2020
- Biddle, B. J. (2013). *Role theory: Expectations, identities, and behaviors*. Academic Press.
- Bozhikin, I., Macke, J., & da Costa, L. F. (2019). The role of government and key non-state actors in social entrepreneurship: A systematic literature review. *Journal of cleaner production*, 226, 730-747. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.076>
- De Meio Reggiani, M. C., Vazquez, M., Hallack, M., & Brignole, N. B. (2019). The role of governmental commitment on regulated utilities. *Energy Economics*, 84(C), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.104518>
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Harmayani, E., Santoso, U., & Gardjito, M. (2019). *Makanan Tradisional Indonesia Seri 1: Kelompok Makanan Fermentasi dan Makanan yang Populer di Masyarakat*. UGM PRESS.
- Heydari, J., Govindan, K., & Jafari, A. (2017). Reverse and closed loop supply chain coordination by considering government role. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 52, 379-398. <http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2017.03.008>
- KBBI. (2016). *Pengertian Tape*. Diakses tanggal 18 November 2020 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tapai>
- Miles, M.B., Huberman, A.M., (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. USA: SAGE.
- Miner, J. B. (2011). *Organizational behavior 6: Integrated theory development and the role of the unconscious*. New York USA, M.E. Sharpe, Inc

- Murdyastuti, A., Ashari, A. K., & Negoro, A. H. S. (2019, September). Business Institutions of Cultural Farmers in Improving Competitiveness in Bondowoso Regency. *Regional Dynamic: Journal of Policy and Business Science*, 1(1), 14-24. <https://doi.org/10.19184/issrd.v1i1.13715>
- Natadjaja, L., & Yuwono, E. C. (2017). *Kearifan Lokal Kemasan Panganan Tradisional*. Penerbit Andi.
- Negoro, A. H. S., Azhari, A. K., & Murdyastuti, A. (2019). Partnership Model In Improving Civil Farmers Competitiveness In Bondowoso District. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 377-385. <http://dx.doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.18680>
- Soekanto, S., & Soemarjan, S. (1969). *Sosiologi: suatu pengantar*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Sundari, Titik. (2010). *Petunjuk Teknis Pengenalan Varietas Unggul dan Teknik Budidaya Singkong*. Malang: Balai Penelitian Kacang Kacangan dan Umbi – Umbian
- Wachisbu, R.D. (2008). *Analisis Usaha Tape Singkong di Kecamatan Wringin dan Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.